

ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TEPAT SASARAN PADA PROGRAM DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Leo Nardu¹, Agus Purnomo², Zakiyah³

¹Ekonomi Syariah, 60202, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM 16510014

²Ekonomi Syariah, 60202, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB NIK 061512850

³Ekonomi Syariah, 60202, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB NIK 061310672

Email : leonardu89@gmail.com

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Termasuk diantaranya adalah program untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan ADD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Rejosari Mataram dalam perspektif ekonomi Islam. Kegunaan penelitian agar dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan yang di ambil dan sebagai pedoman program ADD.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, serta dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa dan tokoh masyarakat di Desa Rejosari Mataram, dengan menggunakan metode *perposive sampling*. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisa model *Miles dan Huberman* dengan metode berfikir deduktif.

Analisis penelitian ini yaitu dalam mendistribusikan ADD di Desa Tumbang Muroi sudah menggunakan asas adil dan merata di beberapa desanyaur. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu pelaksanaan ADD belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena ADD yang sangat minim sehingga komposisi pembagiannya dirasakan kurang untuk masing-masing kegiatan seperti masalah ekonomi produktif yang belum terkelola dengan baik bahkan belum terprogram karena aparatur desa dan tokoh masyarakat lebih memprioritaskan pembangunan jalan yang masih sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pembangunan yang sudah dilaksanakan dari ADD di Desa Tumbang Muroi yaitu pembangunan jalan, gorong-gorong, jembatan, pembangunan sanitasi air bersih dan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Kata Kunci : Pengelolaan alokasi dana desa dan tingkat kesejahteraan

ABSTRACT

Village Fund Allocation is one of the most important aspects of a village to carry out government programs. Included among them are programs to improve the welfare of the people in the region. The purpose of this study is to find out the management of ADD to improve community welfare in Rejosari Mataram Village in perspective Islamic economics. The use of research is so that it can be used as a reference in making decisions taken and as a guideline for ADD programs.

This research uses a type of field research with qualitative descriptive research methods, the methods used in this research are: observation, interviews, and documentation. The population in this study were village officials and community leaders in the Rejosari Village, Mataram, using the *perposive sampling* method. To analyze the data, the writer used Miles and Huberman's model analysis with deductive thinking method.

The analysis of this research is that in distributing ADD in Tumbang Muroi Village, it has used the principle of fairness and equality in several villages. Based on the results of this study, there is a conclusion that the implementation of ADD cannot be felt directly by the community so that it cannot improve the welfare of the community as a whole. Because ADD is very minimal, the composition of the distribution is felt to be insufficient for each activity such as productive economic problems that have not been managed properly and even have not been programmed because village officials and community leaders prioritize road construction which is still lacking while it is a basic need of the community. The development that has been carried out from ADD in Tumbang Muroi Village is the construction of roads, culverts, bridges, construction of clean water sanitation and activities of fostering social institutions

Keywords: Management of village fund allocation and level of welfare

PENDAHULUAN

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu Desa. Pemerintah Desa diyakinilebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih di prioritaskan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a) Alokasi dasar, dan
- b) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota¹.

pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Masyarakat Desa.

Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi maksud pemberian Dana Desa (DD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya:

- a. Membina kehidupan masyarakat desa.
- b. Membina ekonomi desa.
Adapun Kepala Desa dalam membina
- c. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- d. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, mereka menuturkan bahwa pemerintah desa telah melakukan program pembangunan infrastruktur didaerahnya. Pelaksanaan program pembangunan tersebut merupakan hasil dari musyawarah antar dusun, yang kemudian diajukan kepada pemerintah desa sebagai rencana pembangunan pedesaan. Pembangunan tersebut merupakan murni swasembada dari pemerintah desa, dan dengan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur ini mereka menuturkan bahwa masyarakat tersebut merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya

¹Azwardi, Sukanto, *Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 (Juni 2014), hlm. 29 – 41.

kegiatan pembangunan. Akan tetapi Pada tahun 2017 sebelum pemerintah desa tumbang muroi menerima aliran Dana Desa (DD) secara keseluruhan program pemerintahan desa belum dapat berjalan dengan baik karena keterbatasan dana yang dimiliki, sehingga program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum dapat memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan yang tepat guna.

Dari data sementara yang penulis peroleh dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tumbang Muroi.

Tabel 1.1

Dana Desa yang diterima Desa Tumbang Muroi Periode 2017-2019

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2017	Rp. 399.610.787
2	2018	Rp. 441.495.388
3	2019	Rp. 544.078.000
JUMLAH		Rp. 1.370.000.000

Sumber Data : APBD Desa Tumbang Morui 2017-2019

Beberapa program atau kebijakan pemerintah desa tumbang muroi yang telah dilakukan pada tahun 2017 yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program pembangunan pengerasan jalan, pembangunan drainase dan pembangunan gorong-gorong.

Sedangkan pada tahun 2018 digunakan untuk melanjutkan beberapa program yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya, seperti pengerasan jalan perlintasan ekonomi masyarakat dan pengadaan pembangunan pelabuhan desa. Setelah dua tahun berturut pemerintah dapat menjalankan beberapa program secara maksimal dibandingkan dengan sebelum adanya dana desa sebagai pendorong pembangunan dan pemberdayaan.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan yang memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. Pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat langsung memiliki hasil yang lebih efektif dan efisiensi dibandingkan dengan pembangunan desa dengan menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari desa lain.

Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan bekerja secara kooperatif dan menumbuhkan rasa gotong-royong sesama warga desa.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi local yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Namun, pengelolaan dana desa tumbang muroi dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat belum dapat terwujud karna pemerintah desa masih terfokus dalam pembangunan infrastruktur desa.

Adapun data awal besaran pendapatan masyarakat dari beberapa desa yang ada di desa Tumbang Muroi terkait dengan program ADD 2017 – 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pendapatan Rata-rata Penduduk Di desa Tumbang Muroi

NO	DESA / DUSUN	PENDAPATAN / BULAN PADA TAHUN2017	PENDAPATAN / BULAN PADA TAHUN 2019
1	Desa Tumbang Muroi	Rp. 1.600.000	Rp. 1.700.000
2	Dusun Tanjung Kalanis	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000
3	Dusun Telak Kajang	Rp. 1.300.000	Rp. 1.400.000
4	Dukuh Taburu	Rp, 1.300.000	Rp, 1.300.000

Sumber Data : Dokumentasi Desa Tumbang Morui

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Tumbang Muroi tidak mengalami kenaikan masih tetap seperti tahun sebelumnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan tersebut

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian Kualitatif ini menggunakan Metode pendekatan evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif, cara atau teknik. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini berupa fakta-fakta yang di dapat di lapangan. Dalam hal ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk mendapat data-data dari lapangan berkenaan dengan kesesuaian penggunaan alokasi dana desa tepat sasaran yang diperlukan yakni kepada informan yang dirasa lebih mengetahui tentang informasi yang diinginkan penulis. Sumber data Data Primer Data Sekunder Data yang diteliti sebagai bahan penelitian Pemerintah Desa, Aparatur Desa Dan Masyarakat Di Desa Tumang Muroi diperoleh dengan cara :Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat Desa serta Pemerintah Desa yang ada di dalam Desa Tumbang Muroi. Adapun metode pengambilan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah metode convenience sampling , dimana peneliti memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja masyarakat yang ditemui untuk dijadikan sampel.

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis 28 Maret 2018 – Jum'at 13 April 2019

Waktu : 09:00 – 11:00 WIB

Tempat : Desa Tumbang Muroi

Narasumber : Kepala Desa, Aparatur Desa, RT dan Tokoh Masyarakat Desa di Desa Tumbang Muroi

Isi Laporan :

Desa Tumbang Muroi terdiri dari 2 Dusun dan 1 Dukuh, program kerja Desa di Desa Tumbang Muroi tahun ini adalah melakukan perbaikan jalan. sarana dan prasarana desa merupakan instrument utama yang diperlukan dalam rangkam membangun kesejahteraan desa, termasuk jalan. Jalan sebagai infrastruktur penting untuk menunjang lancarnya aktivitas transportasi. Mengingat banyaknya jalan pedesaan yang sehingga di tuntutan untuk segera melakukan perbaikan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu program kerja desa.

Banyaknya jalan yang rusak, sehingga tidak memungkinkan pemerintahan desa dan masyarakat melakukan perbaikan secara bersamaan dikarenakan dana desa yang sangat minim. Maka dari itu perbaikan dilakukan secara bergilir.

Dana Desa sendiri sebenarnya sangat membantu untuk kemajuan desa, dikarenakan banyak infrastruktur jalan banyak yang rusak, pengalokasian ADD lebih fokus pada pembangunan fisik dan operasional desa. Untuk program – program ekonomi kreatif untuk tahun – tahun belum bisa dilakukan dengan baik, karena setiap anak Desa lebih fokus pada perbaikan jalan.

Dalam peningkatan pendapatan masyarakat secara langsung, ADD belum dapat meningkatkan pendapatan, tetapi secara tidak langsung ADD meningkatkan pendapatan buruh, karena adanya pembangunan jalan yang bisa menjadi lapangan pekerjaan sementara bagi buruh atau masyarakat sekitarnya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 di Desa Tumbang Muroi

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tumbang Muroi dikelola langsung oleh aparat desa, kepala desa sebagai penanggung jawab program, sedangkan sekretaris desa sebagai ketua pelaksanaan program untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan program serta pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tumbang Muroi :

1. Alokasi Dana Pembangunan

Luas wilayah di Desa Tumbang Muroi 752 km², dengan jumlah penduduk 3.574 jiwa (2017) dan kepadatan 4.75 km/km². Desa ini tahun 2018 mendapat besaran ADD sebesar Rp.441.495.388,-.

Proses penentuan program ADD di Desa Tumbang Muroi ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan dan di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja operasional penyelenggara pemerintah sebesar Rp.309.046.771,- atau sebesar 70%, Tunjangan, Seltif, insentif dan gaji Rp.132.448.616,- atau sebesar 30%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala Desa Tumbang Muroi dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada Bupati Kabupaten Kuala Kapuas.

2. Data Distribusi Dana Desa Pembangunan

Penyaluran alokasi dan desa dari kas kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksanaan kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) ke kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan rencana kebutuhan dan (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
- b) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas Kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang di tanda tangani oleh kepala desa.
- c) Bendahara desa telah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan kepada pemenang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- d) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibubukan kedalam buku harian (umum) untuk selanjutnya diserahkan kepada pemimpin kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Data distribusi untuk pembangunan desa

	Pembangunan	Biaya
1	Perbaikan Jalan	Rp. 154.523.385,5
2	Pembuatan Sumur Bor	Rp. 154.523.385,5
	Jumlah	Rp.309.046.771

PEMBAHASAN

A. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DESA TUMBANG MORUI

Peraturan pemerintah No 43 tahun 2016 pasal 10 tentang belanja Alokasi Dana Desa untuk ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahn desa, pelaksanaan membangun desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW. Tetapi dalam pelaksanaanya sebaliknya 30% untuk pembangunan Desa dan 70% untuk operasional Desa. Ini menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya ADD terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan ADD Pengaju pada asas :

1. Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
2. Asas adil adalah besarnya alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (Misalnya jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan), selanjutnya disebut alokasi dana propesional. Besarnya persentase perbandingan atas asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Dari data yang di kumpulkan oleh penulis di ketahui bahwa besaran alokasi dana desa di Desa Tumbang Morui pada tahun 2017 berkisar antara Rp. 399.610.787- sampai dengan Rp. 544.078.000,-pada tahun 2019, sudah termasuk anggaran untuk aparatur desa, yang di berikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan.

Sedangkan program untuk pembangunan alokasi dana desa di Desa Tumbang Morui yaitu untuk pembuatan jalan, pengerasan jalan, pembuatan pelabuhan, pembersihan sungai, drainase, pembuatan , untuk bantuan operasional lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, kelompok tani, belan ja pegawai, biaya musyawarah, kegiatan PKK, LPM dan sisanya untuk operasional desa yaitu alat tulis, perlengkapan kantor lainnya, tetapi untuk pemerataan ke dusun-dusun masih belum belum terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan program ADD di ini program dan pengalokasian dana desa di Desa tumbang Morui hanya berfokus pada pembuatan jalan dan tunjangan untuk aparatur desa, sedangkan prasarana yang lain belum tersentuh seperti pembangunan sanitasi, yang lebih dibutuhkan masyarakat belum ditanggapi dengan baik.

Selain terkendala dana ADD yang kurang, dana yang diperoleh hanya difokuskan untuk operasional desa, belanja paratur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ini untuk belanja aparatur desa sebesar 60% dan untuk kegiatan ekonomi hanya terlihat dari presentasi penggunaan alokasi dana desa antara 35% - 45%.

Proritas penggunaan dama desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tetinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, menyebutkan bahwa prioritas dana desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuanpembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan dana desa untuk penggunaan kebutuhan dasar meliputi:
 - a) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes

- b) Pengelolaan dan pembinaan posyanda
 - c) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Prioritas penggunaan dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya diantaranya dapat meliputi:
- a) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan usaha tani
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan embung desa
 - d) Pembangunan energi baru dan terbarukan
 - e) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 - f) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
 - g) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa
 - h) Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk
 - i) budidaya perikanan
 - j) Pengembangan sarana dan prasarana produksi desa
3. Pembangunan dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi local didasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Tumbang Morui perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandiriin berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang.

Pada umumnya pelaksanaan program ADD yang ada di desa Tumbang Morui adalah pembangunan fisik desa, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana desa seperti perbaikan jalan, pembangunan kantor desa, pembangunan sarana kesehatan dan sarana pendidikan.

Dari beberapa penjelasan di atas, terlihat bahwa tujuan dari program Alokasi Dana desa di Desa Tumbang Muroi ini dapat dikatakan tercapai yaitu peningkatan infrastruktur, dan peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya. Sedangkan peningkatan pendapatan desa dan masyarakat belum tercapai secara menyeluruh, karena terkendalanya dana yang kurang dan ketidaksesuaian program yang disusun oleh pemerintahan desa setempat. Aparatur tidak memprioritaskan kegiatan ekonomi produktif sebagai salah satu program dari alokasi dana desa, aparat desa lebih memprioritaskan pembangunan pengerasan jalan dan kegiatan yang kurang produktif lainnya.

Adapun bisa kita lihat tabel dibawah ini pendapatan rata-rata masyarakat Desa Tumbang Morui.

Pendapatan Rata-rata Penduduk Di desa Tumbang Muroi

NO	DESA / DUSUN	PENDAPATAN /BULAN PADA TAHUN 2017	PENDAPATAN /BULAN PADA TAHUN 2019
1	Desa Tumbang Muroi	Rp. 1.600.000	Rp. 1.700.000
2	Dusun Tanjung Kalanis	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000

3	Dusun Teluk Kajang	Rp. 1.300.000	Rp. 1.400.000
4	Dukuh Taburu	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000

Sumber Data : Dokumentasi Desa Tumbang Morui

Dari tabel di atas terlihat bahwa menunjukkan alokasi dana desa dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa Tumbang morui, kurang baik dalam perencanaan program dan pengelolaannya.

Tingkat pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat materil.

Adanya ADD ini tidak memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat, ini karena program ADD serta pengelolaan di desa Tumbang Morui kurang memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seharusnya dari program ADD digunakan untuk pelatihan – pelatihan kewirausahaan dan pembuatan industri rumah tangga kreatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

B. Penggunaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Tumbang Muroi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi Islâm berangkat dari kesadaran tentang etika, sebuah *ethical economy*, sedangkan sistem ekonomi lain, baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan (*interest*). Kapitalisme berangkat dari kepentingan perorangan (*selfishness*) dan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif (*collectivism*). Dengan ekonomi bedasar etika itu agama tidak menjadi alat bagi suatu kepentingan. Tugas umat ialah memikirkan bahwa agamanya menghendaki sebuah *ethical economy* tetapi tetap tanggap kepada kepentingan-kepentingan yang nyata.

Islam mengajarkan kita tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitu pun dengan perencanaan. Pemerintahan desa sebagai pemberi kebijakan, dalam kaitan pada program ADD ini sangatlah penting.

Pendapatan masyarakat yang merata, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standarhidup yang baik (*nishab*) adalah hal yang paling mendasari distribusi retribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa :59)

Menjelaskan adanya ketaatan kepada Allah SWT, Rasul dan Ulul Amri, ataupun pemimpin dalam hal ini yaitu pemerintah setempat. Pemerintah sebagai pemberi kebijakan dalam melaksanakan program ADD. Dalam hal ini pemerintah desa memiliki peran penting dalam keberlangsungan pelaksanaannya di Desa Tumbang Muroi merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dalam peningkatan pendapatan.

Dalam keberlangsungan pelaksanaan program ADD yang baik menghasilkan sebuah peran yaitu adanya kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan pendapatan. Adapun pendapatan

masyarakat dalam islam adalah perolehan barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan – aturan yang bersumber syari'at Islam. Pendapatan masyarakat yang merata sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai.

Berdasarkan penjelasan di atas dan merujuk pada data yang telah penulis sajikan sebelumnya bahwa pelaksanaan ADD di Desa Tumbang Muroi belum sepenuhnya terlaksana, hal itu berdasarkan indikator dan tujuan dalam ekonomi Islam adalah:

1. Pembangunan sumber daya insani, yaitu menjadikan manusia sebagai objek utama kebijakan pembangunan insani. Fokus utama dilakukan pada pengembangan pendidikan, orientasi spiritual dan pengembangan struktur hubungan yang berbasiskan kepada kerjasama, perkongsian dan penyertaan.
2. Pertambahan pengeluaran yang bermanfaat, dalam hal ini diutamakan pada pengeluaran yang mengutamakan keperluan dasar (dharuriyat) dibandingkan dengan pengeluaran atas barang pelengkap (kamaliyat) dan barang mewah (tahsiniyat).
3. Peningkatan kualitas kehidupan, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja, pengadaan system jaminan sosial, dan pemerataan pendapatan, pembangunan yang seimbang, yaitu pembangunan yang harmoni, tidak terjadi kepincangan pembangunan berbagai sektor dan wilayah.

Dari data yang telah disajikan sebelumnya pemerintah desa Tumbang Muroi belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintah desa yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan amanah merangkul semua pihak dalam pelaksanaannya. Dalam pembangunan sarana dan prasarana desa dibangun bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, serta perekonomian.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77:

وَأَبْنِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS. Al-Qasas :77)

Berdasarkan ayat tersebut kandungan yang sangat jelas bahwa kewajiban seorang muslim dan manusia untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk memperoleh harta dan mencari harta tersebut dengan bersungguh – sungguh sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT.

Manusia berkewajiban untuk berusaha dengan bersungguh – sungguh dalam menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam mencari, menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di muka bumi, karena dalam ayat AL-Qashash telah disebutkan Allah tidak merubah suatu kaum melainkan hambanya yang merubah. Artinya Allah telah membukakan jalan untuk masyarakatnya dalam menggunakan potensi dan kemampuannya, tergantung kepada masyarakatnya dapat menggunakan program yang telah ada atau tidak.

Jika melihat dari teori yang menjelaskan dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai, prinsip dan tujuan dasar dalam Ekonomi.²Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa seharusnya menerapkan sitem Ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan takaful (tanggung jawab sosial).

1. Keadilan

²Ruslan Abdul Ghofur Noor, Op.Cit., h. 62

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran

2. Tanggung Jawab atau Amanah

Dalam dunia ini kita mendapatkan begitu banyak amanah, baik dari Allah maupun dari sesama manusia namun kebanyakan dari mereka belum menerapkan sifat terpuji itu secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Secara Harfiah, amanah artinya dipercaya. Kalau secara khusus, amanah berarti mengembalikan sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepadanya. Adapun makna Umumnya adalah menyampaikan atau melaksanakan sesuatu yang di tugaskan kepadanya. Dan lawan dari sifat amanah tersebut adalah khianat.

3. *Tafakul* (tanggungjawab sosial)

Takaful atau dikenal juga sebagai Asuransi Syariah atau Ta'min atau Tadhmun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan /atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariahnya tanggungjawab sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pengelolaan data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pada pelaksanaan program alokasi dana desa tahun 2017 di Desa Tumbang Muroi dalam mendistribusikan ADD pembagian dana untuk setiap desanya di bagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi masing – masing desa. Berdasarkan peraturan pemerintah di atas, desa Tumbang Muroi, yaitu paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari ADD digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW. Tetapi dalam pelaksanaannya sebaliknya 30% untuk pembangunan Desa dan 70% untuk operasional Desa. Ini menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya ADD terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dari data yang di kumpulkan oleh penulis di ketahui bahwa besaran alokasi dana desa di Desa Tumbang Morui tahun 2017 berkisar antara Rp. 390.000.000,- sampai dengan Rp. 540.000.000,- per tahun, sudah termasuk anggaran untuk aparatur desa, yang di berikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan.

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa tahun 2017 di Kecamatan Ketapang dalam perspektif Ekonomi Islam belum sesuai dengan nilai, prinsip dan tujuan sistem Ekonomi Islam yaitu : Keadilan, Pemerintah Desa selayaknya adil dalam pembagian anggaran, adil bukan berarti sama rata tetapi melihat mana yang lebih prioritas untuk dianggarkan terlebih sesuai kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. banyak terdapat beberapa Desa yang kurang adil dalam pelaksanaannya. Tanggung Jawab atau Amanah, Pemerintah desa dapat memanfaatkan bukan menguasai secara mutlak dana desa melainkan harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat agar menjadi lebih baik secara perekonomian dan kualitas hidup. Dari data yang telah disajikan sebelumnya pemerintah desa Tumbang Muroi belum sepenuhnya mempertanggung jawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintah desa yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan amanah merangkul semua pihak dalam pelaksanaannya. Dalam pembangunan sarana

dan prasarana desa dibangun bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, serta perekonomian syariahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A saibani. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 2014, Jakarta: Media Pustaka.
- Agustina E.Wahyuningtyas.2010. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Defisit Anggaran Terhadap Investasi di Indonesia tahun 1986-2008. Skripsi. Fakultas Ekonomi. UNDIP.
- Akeju KF, Olanipekun DB. 2015. Unemployment and Economic Growth in Nigeria. *International Journal of African and Asian*. 11: 92-96.
- Alexander MF, Damanhuri DS. 2014. Masalah dan Kebijakan : Pembangunan Ekonomi Indonesia. Bogor (ID): IPB Press.
- Andiarma Tesamaris dan Siti Fatimah.2005. Analisis Kausalitas Antara Hutang Luar Negeri Dengan Defisit Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 6 No 2.
- Anggito Abimanyu, 2005. Kebijakan Fiskal dan Efektivitas Stimulus Fiskal di Indonesia. Aplikasi Model Makro-MODFI dan CGE-INDORANI. *Jurnal Ekonomi Indonesia* No. 1. Disampaikan dalam kongres ISEI ke-XV di Malang, Jawa Timur.
- Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan 2014, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Boediarso Teguh Widodo. 1996. Dampak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Terhadap Sektor Moneter Dan Neraca Pembayaran. *Jurnal Keuangan Dan Moneter* Vol. 3 No. 3 Hal: 2.
- Boonperm J, Houghton J, Khandker SR, Rukumnuaykit P. 2012, *Appraising the Thailand Village Fund*. The World Bank.
- Damodar N. Gujarati. 1995. *Basic Econometric*. Third edition. United States Military academy, west point. McGraw-Hill international. Singapore.
- Daryono, Soebagiyo. 2012. Analisis Pembiayaan Defisit Anggaran Di Indonesia. Ringkasan disertasi S3. (tidak dipublikasikan). Pasca sarjana PDIE V. Universitas Brawijaya. Malang.
- Deniey Adi Purwanto.2005. Manajemen Hutang Luar Negeri Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bisnis dan Ekonomi Politik. Vol.6(1).
- Dornbusch R.2001. *Makroekonomi*. Edisi kedelapan. Tokyo: McGraw-Hill Book Company.
- Dumairy, 1996. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta
- Edgmand, Michael R. 1987. *Makroekonomi. Teori dan Kebijakan*. New Jersey. Prentice-hall. Binarupa Aksara. Jakarta
- Edy Rahmantlyo Tarsilohadi, 2005. Ketimpangan Dana dan Pembiayaan Dalam Negeri, Haruslah Dipenuhi Dengan Hutang Luar Negeri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 6, No. 2. (206 - 226). Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
- Gunardi. H.Seldadyo. 2000.Defisit APBN dan Fiskal Sustainabel. Suatu Studi Tentang Ekonomi Indonesia 1983/1984-1999/2000. Penelitian program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. (tidak dipublikasikan).
- Gunardi. H.Seldadyo. 2000.Defisit APBN dan Fiskal Sustainabel. Suatu Studi Tentang Ekonomi Indonesia 1983/1984-1999/2000. Penelitian program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. (tidak dipublikasikan).
- Heriberta. 1997. Inflasi dan Pembiayaan Pengeluaran Pemerintah, Suatu Analisis dan Aplikasi di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Pembangunan*, edisi 7. FE Unja.

- Insukindro, 1995. *Ekonomi Uang dan Bank. Teori dan Pengalaman Di Indonesia*. BPFE, UGM. Yogyakarta.
- Kartika Dewi Sri Susilowati, 2006. *Kajian tentang Manajemen Surat Hutang Negara dan Pengaruhnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Vol. 4, No. 3.
- Kusfiardi, 1998. *Kebijakan dan Manajemen Anggaran Negara Dalam Kekangan Beban Hutang*. *Bisnis dan Ekonomi Politik* Vol. 2 (4).
- Mishkin, Frederic S. 1992. *Keuangan Ekonomi, Bank, Pasar Uang*. New York. Harper Collins Publishers.
- Muana Nanga, 2005. *Makro Ekonomi. Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Kedua. Rajawali Persada. Jakarta
- Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Douglas D.Purvis. 1991. *Pengantar Makroekonomi*. Edisi kedelapan. Erlangga. Jakarta
- Teguh Pamuji, 2008. *Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Ekonomi Makro di Indonesia tahun 1993-2007*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Program Pasca Sarjana UNDIP. Semarang.